

# Implementasi Program Badung Anti Kantong Plastik “BATIK” Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik di Kabupaten Badung (Studi Kasus di Desa Adat Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung)

Ni Made Juniantari<sup>1)</sup>, Ni Wayan Supriyanti<sup>2)</sup>, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : [juniantari216@gmail.com](mailto:juniantari216@gmail.com), [prily\\_baligirl@yahoo.com](mailto:prily_baligirl@yahoo.com) , [wiwin.fisip@gmail.com](mailto:wiwin.fisip@gmail.com)

## ABSTRACT

*Badung Anti Plastic Bag Program (BATIK) is an innovation program that aims to reduce single use plastic bags in Badung Regency according to the concept of local wisdom. The aim of this research is to find out the implementation of BATIK Program based on local wisdom in an effort to reduce plastic waste in Badung Regency, especially in Sempidi Village. This research is descriptive qualitative with observation, interviews, and documentation. The output of the research are based on an analysis with four implementation indicators of Edward III shows this program has not been implemented or running well because there are problems in indicators such as communication and outreach among the public are not optimal, lack of adequate budget and facilities, consideration to the addition of labor and wages and there is no absolute consequences regulations in the Sempidi Traditional Village.*

**Keywords:** *Implementation, Badung Anti Kantong Plastik (BATIK), Sempidi Traditional Village.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

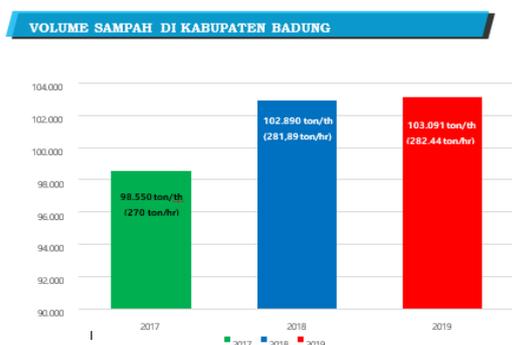
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 memuat Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat maupun Daerah menyatakan melalui proses tersebut, pemerintah diharapkan untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan publik yang ada.

Contoh permasalahan publik yang dihadapi masyarakat dan memerlukan penanganan oleh pemerintah adalah permasalahan sampah. Hal tersebut dikarenakan menurut *Riset Sustainable Waste Indonesia (SWI)*, terdapat sekitar 24% sampah di Indonesia belum terkelola. Dimana sekitar 65 juta ton sampah per hari diproduksi di Indonesia, hampir 15 juta ton masih mencemari lingkungan karena tidak mendapat penanganan. Selain itu, 7 persen telah didaur ulang dan 69 persen berakhir di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA (Badan Litbang

Kemendagri, 2018). Permasalahan sampah akibat perkembangan suatu wilayah yang dinamis sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk pun terjadi di Kabupaten Badung.

Kabupaten Badung sebagai kabupaten di Provinsi Bali memiliki permasalahan sampah kompleks. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas pariwisata mempengaruhi peningkatan volume sampah di Kabupaten Badung. Selanjutnya, permasalahan sampah di Kabupaten Badung juga disebabkan oleh sampah kiriman di kawasan pantai. Sampah yang didominasi oleh plastik ini terdapat di sepanjang Pantai Kuta, Kedonganan, Legian, Seminyak, Canggu dan lain-lain sepanjang 12 km dengan berat mencapai 250 Ton perhari (Bali Post, 2019). Selain itu, permasalahan sampah juga berasal dari kegiatan masyarakat setiap harinya terutama sampah rumah tangga. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung tahun 2019, berikut adalah volume sampah yang ditangani dan di produksi selama tahun 2017-2019 di Kabupaten Badung.

**Grafik 1.1 Volume Sampah di Kabupaten Badung Tahun 2017-2019**



(Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, 2019)

Sesuai dengan tabel volume sampah Kabupaten Badung 2017-2019 disimpulkan bahwa jumlah produksi sampah selama tahun 2017-2019 di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung berupaya serius untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut melalui Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK). Program ini berupaya pencegahan kerusakan lingkungan dengan menekan timbulan atau produksi sampah plastik melalui pengurangan penggunaan kantong plastik berbasis kearifan lokal melalui pembuatan aturan desa adat selain peraturan resmi Pemerintah Kabupaten Badung yang dinamakan *Perarem Pengele* Desa Adat.

Program Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK pada peluncurannya memilih Desa Adat Sempidi sebagai lokasi percontohan (*pilot project*) karena beberapa hal yaitu: pertama, letak geografis Desa Adat Sempidi tersebut yang berada di pusat kota Kabupaten Badung sekaligus merupakan letak Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Kedua, di Desa Adat Sempidi terdapat berbagai jenis lokasi atau objek sasaran yang dapat dijadikan sebagai fokus pelaksanaan Program Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK seperti pura, sekolah, perkantoran, pasar adat, hotel, toko modern dan tempat usaha lainnya. Ketiga, Desa Sempidi merupakan satu-satunya desa di

Kabupaten Badung yang telah memperoleh penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Keempat, dapat memberikan contoh kepada desa-desa lain di Kabupaten Badung.

Namun dalam pelaksanaannya, Program Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK memiliki masalah yang masih dihadapi yaitu: (1) Sulitnya mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat khususnya di wilayah Desa Adat Sempidi (2) Volume timbulan atau produksi sampah plastik di wilayah Pasar Tradisional Desa Adat Sempidi yang masih tinggi, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran para pedagang untuk menghentikan penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam proses transaksi jual-beli (3) Belum ditetapkannya sanksi dalam peraturan Desa Adat Sempidi atau *Perarem Pengele Desa Adat Sempidi* karena belum adanya kesepakatan antara lembaga adat dengan seluruh masyarakat di wilayah Desa Adat Sempidi. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh implementasi Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK)

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Badung Anti Kantong Plastik “BATIK” Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik di Kabupaten Badung khususnya di Desa Adat Sempidi, Mengwi, Badung?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan mengetahui dan memaparkan implementasi Program Badung Anti Kantong Plastik “BATIK” berbasis kearifan lokal dalam upaya mengurangi sampah plastik di Kabupaten Badung khususnya di Desa Adat Sempidi, Mengwi, Badung.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Landasan Teori**

#### **Kebijakan Publik**

Kamus Administrasi Negara (Chandler dan Plano: 107) menyatakan kebijakan publik sebagai pemanfaatan strategis terhadap sumber daya guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat maupun pemerintahan.

Definisi kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn dalam Suharto (2007:4) mengemukakan kebijakan publik sebagai sejumlah kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hasil-hasil tersebut adalah tujuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta sesuai tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan nasional yang penuh keadilan.

### **Landasan Konseptual**

#### **Implementasi Kebijakan**

Sabatier dalam Widodo (2012:87) mengatakan implementasi merupakan kegiatan pelaksanaan program setelah ditetapkan atau dirancang menjadi upaya penyelesaian masalah. Implementasi

kebijakan terjadi setelah disahkan panduan-panduan kebijakan serta mencakup kegiatan administrasi kebijakan serta efek yang ditimbulkan.

Menurut Edward III dalam Agustino (2014:149) terdapat empat indikator yang menjadi tolak ukur baik dan tidaknya pelaksanaan program atau kebijakan, antara lain:

1. Komunikasi: mengkaji terkait transmisi penyampaian informasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan program.
2. Sumber daya: mengkaji terkait komponen pendukung berupa sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas suatu program.
3. Disposisi: mengkaji terkait sikap dan kemampuan dari pelaksana program atau kebijakan.
4. Struktur birokrasi: mengkaji adanya *Standard Operational Procedures* (SOPs) dan fragmentasi.

### **Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK)**

Program Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK merupakan program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung pada 27 Mei 2018. Peluncuran Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) dilatarbelakangi oleh adanya timbulan sampah plastik di Kabupaten Badung pada tahun 2017 yang mencapai 27,51 ton/hari (DLHK Kabupaten Badung, 2017).

Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK ini merupakan suatu upaya pencegahan kerusakan lingkungan dengan menekan timbulan atau produksi sampah plastik melalui pengurangan penggunaan kantong plastik berbasis kearifan lokal serta mewujudkan kawasan-kawasan anti kantong plastik dengan mengajak pihak pengelola tempat atau objek wisata, pura, hotel & restoran, kantor Pemerintah dan swasta, sekolah, pasar, toko modern dan tempat usaha di wilayah Kabupaten Badung.

Beberapa hal yang membedakan program ini dengan program pemerintah lainnya yaitu selain menerapkan peraturan resmi pemerintah, Program Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK mengusung konsep kearifan lokal melalui kerjasama dengan Desa Adat di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Kerjasama tersebut dilakukan dengan melibatkan Desa adat dalam upaya pengurangan timbulan sampah plastik melalui pembuatan aturan desa adat yang dinamakan *Perarem Pengele Desa Adat*.

### **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian mengenai implementasi Program Badung Anti Kantong Plastik "BATIK" Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik di Kabupaten Badung dengan Studi Kasus di Desa Adat Sempidi, Mengwi, Badung menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Melalui teknik *purposive*, penentuan kriteria

informan sesuai penelitian dan dapat memberikan informasi terkait obyek yang diteliti dan disebut *key-informan*. Sedangkan penetapan informan melalui teknik *snowball* dengan bantuan *key-informan* sesuai petunjuk.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Temuan**

#### **1. Komunikasi**

##### **a. Transmisi Penyaluran Komunikasi**

Transmisi penyaluran komunikasi dalam program ini terdiri dari komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal dalam pelaksanaan Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) oleh pimpinan kepada bawahan atau komunikasi antara pimpinan dan para pegawai serta instruksi program dan pembuatan kesepakatan internal terkait sanksi yang diberikan sudah berjalan dengan baik. Sedangkan komunikasi eksternal antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan Desa Adat Sempidi berlangsung dengan baik karena sebelum pelaksanaan telah disampaikan bahwa Desa Adat Sempidi menjadi desa percontohan atau *pilot project* dan telah disampaikan proporsi tanggung jawab dan peran Desa Adat Sempidi

##### **b. Sosialisasi**

Sebelum pelaksanaan Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pengurus Desa Adat Sempidi dan Pecalang di lingkungan Desa Adat Sempidi. Selanjutnya tugas dan kewenangan Desa Adat Sempidi

untuk meneruskan informasi dan sosialisasi terkait Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) kepada seluruh lapisan masyarakat dan kawasan-kawasan anti kantong plastik yang telah ditetapkan. Sedangkan proses sosialisasi lanjutan ke masing-masing banjar dan pasar adat yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Desa Adat Sempidi belum terlaksana dengan baik. Ini mengakibatkan informasi belum diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.

#### **2. Sumber Daya**

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia atau pegawai yang dipekerjakan sesuai Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 terdiri dari 22 orang. Tergabung dalam satgas pembinaan dan pengawasan sub instansi/kantor-kantor dan tempat usaha/kegiatan, satgas pembinaan dan pengawasan sub sekolah dan desa/kelurahan, satgas pembinaan dan pengawasan sub desa adat dan objek wisata, satgas publikasi, satgas arsip, dan satgas data. Tim pengawasan sub desa adat dan objek wisata menangani sejauh ini dapat mengerjakan tugas dengan baik melalui kerjasama dengan para pengurus Desa

##### **b. Sumber Daya Anggaran**

Sumber daya anggaran untuk program ini memang belum dianggarkan. Hal tersebut dikarenakan sifat program ini yang berupa inovasi bersifat integrasi atau saling berhubungan dengan satuan tugas lain baik internal maupun eksternal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

### **c. Sumber Daya Fasilitas**

Belum terdapat pengadaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung langsung dari program ini. Pemberian tong sampah berstiker Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) merupakan hasil sinergi dengan Bidang 2 DLHK Kabupaten Badung yang menangani perihal pengadaan sarana kebersihan. Masyarakat Desa Adat Sempidi yang merasakan langsung pelaksanaan program ini juga menyatakan bahwa bantuan fasilitas pendukung yang diberikan oleh pemerintah belum memadai. Sehingga masyarakat mengharapkan adanya bantuan sarana dan prasarana yang lebih memadai seperti pengadaan tas belanja ramah lingkungan yang gratis ataupun disubsidi untuk membangkitkan antusiasme masyarakat melaksanakan program ini

### **3. Disposisi**

#### **a. Pengangkatan pegawai**

Para pegawai telah ditempatkan DLHK Kabupaten Badung sesuai dengan kemampuan kerja sehingga bekerja secara efektif dan optimal sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Sikap tim pelaksana Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) sudah baik. Dalam penyampaian informasi juga sudah jelas, baik, dan menunjukkan sikap yang ramah. Sehingga pengurus Desa Adat dan masyarakat dapat menerima program ini dengan baik. Tetapi masyarakat sendiri belum mengetahui lebih lanjut mengenai sikap para pelaksana karena belum pernah bertemu secara langsung.

### **b. Insentif atau gaji atau pengupahan**

Upah atau gaji yang diberikan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan. Para pegawai digaji sesuai dengan gaji yang seharusnya tanpa mendapatkan insentif tambahan dari program ini. Selain itu penambahan gaji atau upah sejauh ini dirasa belum perlu karena tugas yang dikerjakan masih sesuai dengan TUPOKSI Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Satgas Pembinaan dan Pengawasan Sub Desa Adat dan Objek Wisata berpendapat pengupahan yang lebih tinggi untuk para staf yang bekerja dalam Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) perlu untuk dipertimbangkan karena sosialisasi dapat dilakukan dimana saja bahkan diluar jam kerja.

### **4. Struktur Birokrasi**

#### **a. Standard Operating Procedures (SOPs)**

Pelaksanaan Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) telah sesuai dengan SOP Pembinaan yang dirancang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). SOP Pembinaan tersebut berupa skema-skema kawasan anti kantong plastik di kawasan pura dan objek wisata, pasar, toko modern, perkantoran, dan sekolah. Tetapi sesuai konsep kearifan lokal masih terdapat permasalahan terkait sanksi yang belum dapat diterapkan karena memerlukan pembahasan lebih lanjut agar sesuai dan tidak memberatkan masyarakat.

## **b. Fragmentasi**

Fragmentasi atau penyebaran tugas dan tanggung jawab Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) belum berjalan secara seimbang karena masih terdapat beberapa tim atau unit kerja yang memerlukan bantuan unit kerja lain sehingga penyebaran tanggung jawab menjadi tidak seimbang dalam pelaksanaannya.

## **Analisis Hasil Temuan**

### **1. Komunikasi**

Indikator komunikasi pada Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) dapat dikatakan belum berjalan dengan baik Hal tersebut dikarenakan komunikasi yang baik hanya terjadi pada internal DLHK Kabupaten Badung dan secara eksternal dengan Pengurus Desa Adat Sempidi. Namun berbeda halnya dengan komunikasi pada masyarakat yang belum berjalan maksimal sehingga masyarakat belum memperoleh informasi jelas tentang program ini. Hal ini berdampak pada partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik.

### **2. Sumber Daya**

Indikator sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas. Indikator tersebut menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Indikator sumber daya dalam Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) belum terlaksana secara maksimal karena indikator memadai hanya terdapat pada sumber daya manusia, sedangkan terdapat kekurangan pada

anggaran dan fasilitas. Jika dilihat dari sumber daya manusia cukup memadai dari segi kuantitas dan kemampuan. Program ini juga dibantu oleh pengurus Desa Adat Sempidi. Selanjutnya sumber daya anggaran yang tidak memadai akan memengaruhi sumber daya fasilitas yang diterima oleh masyarakat dari program ini. Namun Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) ini sendiri tidak memiliki anggaran yang dapat digunakan dalam proses operasionalisasi program. Begitu juga sumber daya fasilitas yang diberikan kepada masyarakat sangat minim dan tidak memadai. Karena tidak adanya anggaran untuk program ini.

### **3. Disposisi**

Disposisi pada program Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) belum berjalan secara maksimal karena masyarakat belum merasakan sikap pelaksana secara langsung karena para pelaksana belum melakukan pendekatan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, terkait insentif atau pengupahan para pegawai dalam sub desa adat dan objek wisata mengharapkan adanya pertimbangan terkait peningkatan insentif karena pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tidak jarang berada di luar jam kerja yang seharusnya.

### **4. Struktur Birokrasi**

Indikator struktur birokrasi Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) belum berjalan dengan baik karena masih terdapat permasalahan pada SOPs program yang belum resmi yaitu belum sesuai dengan kaidah seharusnya serta ditandatangani oleh pemerintah yang bersangkutan. selanjutnya

sanksi perarem pengele yang belum ditetapkan di Desa Adat Sempidi mengakibatkan program ini belum mampu mengikat dan mengatur masyarakat secara maksimal. Serta pembagian tugas atau frgmentasi yang belum berjalan dengan seimbang karena masih ada tim yang membutuhkan bantuan tim lainnya.

### **Rekomendasi Terhadap Penyempurnaan Implementasi Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik di Kabupaten Badung**

#### 1. Komunikasi

Melaksanakan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung bersama dengan pengurus Desa Adat Sempidi khususnya untuk pasar tradisional Desa Adat Sempidi sehingga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung dengan baik Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung sebaiknya meningkatkan sosialisasi mengenai adanya program ini melalui media sosial ataupun media cetak.

#### 2. Sumber Daya

Melakukan pengadaan anggaran untuk Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) DLHK Kabupaten Badung perlu dilakukan. Hal ini berkaitan dengan sumber daya fasilitas karena tidak adanya anggaran mengakibatkan masyarakat tidak

mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang program yang memadai.

#### 3. Disposisi

DLHK Kabupaten Badung bersama dengan pengurus Desa Adat Sempidi perlu melakukan pendekatan kembali dengan masyarakat sebab masyarakat belum merasakan sikap para pelaksana karena belum bertemu secara langsung dalam penyampaian ataupun pelaksanaan program.

#### 4. Struktur Birokrasi

Pembuatan *Standard Operating Procedurs* (SOPs) yang resmi dan sesuai dengan kaidah SOPs yang seharusnya. Hal tersebut karena selama ini Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) hanya menggunakan SOPs berupa skema-skema kawasan anti kantong plastik tanpa memuat dasar hukum dan penetapan resmi yang ditandatangani oleh pemerintah yang bersangkutan.

Penyelesaian peraturan adat berupa *Perarem Pengele* oleh Pengurus Desa Adat Sempidi agar pelaksanaan Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) dapat lebih efektif dan mengikat. Serta memacu kembali setiap desa adat di Kabupaten Badung untuk memastikan *Perarem Pengele* desa adat telah dibuat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan situasi dan kondisi desa adat tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan implementasi Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) belum terlaksana atau berjalan dengan baik. Hal tersebut diuji dengan empat indikator implementasi Edward III dalam Agustino (2014:149) dikarenakan masih terdapat permasalahan pada beberapa indikatornya yaitu terkait dengan komunikasi dengan masyarakat yang belum maksimal, tidak adanya anggaran dan fasilitas tidak memadai, sikap pelaksana yang belum dirasakan langsung oleh masyarakat, *Standard Operational Procedures* (SOPs) yang belum sesuai serta peraturan desa adat yang belum optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Rujukan Bersumber Dari Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Azwar. 1990. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Mutiara
- Kadji, Yulianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Realitas*. Jawa Timur: Cahaya Abadi
- Keban, Yeremias T. 2008. *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gaya Media
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Notoatmojo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Wahyudi, Agus. 2014. *Pesona Kearifan Jawa*. Yogyakarta: Dipta
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press

### Dokumen Pemerintah

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 yaitu Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Profil Kelurahan Sempidi Tahun 2019

#### Sumber Jurnal dan Referensi Online

Badan Litbang Kemendagri. 2018. *Riset: 24 Persen Sampah di Indonesia Masih Tak Terkelola*. Tersedia di <http://litbang.kemendagri.go.id/websit e/riset-24-persen-sampah-di-indonesia-masih-tak-terkelola/> (diakses pada 4 Agustus 2019)

Sudrajat, Maulidyka Agustan., Daud Liando., Stefanus Sampe. 2017. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebershan di Kota Manado*. Sam Ratulangi. Tersedia di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/16660>.

Putra, Putu Ngurah Bagus Robin Cahaya. 2016. *Efektivitas Perda No.7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Mewujudkan Pariwisata*

*Berkelanjutan di Kabupaten Badung (Studi Kasus di Pantai Kuta)*. Universitas Udayana. Tersedia di <https://www.unud.ac.id/in/tugas-akhir1490561025.html>. (diakses pada 27 Maret 2019)

O'Neill, Erin A. 2018. *Trash Talk: The Effects of Plastic Pollution on Seabirds in Narragansett Bay*. Universitas Salve Regina. Tersedia di [https://digitalcommons.salve.edu/givewcontent.cgi?article=1125&context=journal\\_these](https://digitalcommons.salve.edu/givewcontent.cgi?article=1125&context=journal_these). (diakses pada 20 September 2019)

Rukani, Pauline. 2019. *Plastics and Circular Economy: An Analysis of The Environmental Regulations' Effectiveness in Plastic Waste Management and The Intergration of Circular Economy in Harare, Zimbabwe*. Universitas Twente. Tersedia di <https://essay.utwente.nl/795151/MEEM%20MASTER%20THESIS%20FINAL%20REPORT-%20PAULINE%20RUKANI-s1759841%20-2019%29.pdf>. (diakses pada 20 September 2019)